



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
26. Peraturan ...

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 22);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33), sebagaimana diubah yang kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);

33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 11);

42. Peraturan ...

42. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
43. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 44);
44. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
45. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 77);
46. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 81);
47. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 3);
48. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
 TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SKPD PEMUNGUT	TARGET TA 2017	TARGET TRIBULAN I		TARGET TRIBULAN II		TARGET TRIBULAN III		TARGET TRIBULAN IV	
				%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah		37.898.472.200,00		6.395.443.541,00		13.462.620.521,00		24.184.480.823,00		37.898.472.200,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah		29.988.488.800,00		4.431.376.316,00		9.541.082.196,00		18.330.131.898,00		29.988.488.800,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	Badan Pendapatan Daerah	350.008.800,00	15	54.190.080,00	34	117.411.840,00	64	222.781.440,00	100	350.008.800,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	Badan Pendapatan Daerah	1.328.761.200,00	10	139.468.500,00	25	334.724.400,00	51	678.746.700,00	100	1.328.761.200,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	Badan Pendapatan Daerah	71.900.000,00	15	10.761.320,00	33	23.540.388,00	71	51.116.270,00	100	71.900.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah	886.680.000,00	15	136.800.000,00	33	296.400.000,00	71	562.400.000,00	100	886.680.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pendapatan Daerah	12.000.000.000,00	18	2.160.000.000,00	39	4.680.000.000,00	74	8.880.000.000,00	100	12.000.000.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	Badan Pendapatan Daerah	35.838.000,00	14	5.048.784,00	31	10.939.032,00	58	20.756.112,00	100	35.838.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah	105.580.800,00	16	17.107.632,00	35	37.066.536,00	67	70.331.376,00	100	105.580.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04.02.01.00.00.4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	3.209.720.000,00	17	558.000.000,00	35	1.116.000.000,00	67	2.294.000.000,00	100	3.209.720.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	12.000.000.000,00	11	1.350.000.000,00	24	2.925.000.000,00	46	5.550.000.000,00	100	12.000.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		7.909.983.400,00		1.968,116,725,00		3.921,537,325,00		5.877,915,175,00		7.909.983,400,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		5.147.242.100,00		1.265.058.525,00		2.528.997.175,00		3.792.932.825,00		5.147,242.100,00
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Dinas Kesehatan	384.727.500,00	23	94.722.000,00	46	188.969.000,00	69	286.031.000,00	100	384.727.500,00
2.05.01.01.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	562.779.000,00	25	140.694.750,00	50	281.389.500,00	75	422.084.250,00	100	562.779.000,00
1.04.01.01.00.4.1.2.01.17	Retribusi Pelayanan Penguburan /Pemakaman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.250.000,00	25	6.062.500,00	50	12.125.000,00	75	18.187.500,00	100	24.250.000,00
2.09.01.01.00.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	2.336.168.500,00	25	583.347.000,00	50	1.166.694.000,00	75	1.750.041.000,00	100	2.336.168.500,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.600.000,00	25	16.650.000,00	50	33.300.000,00	75	49.950.000,00	100	66.600.000,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	182.610.120,00	22	40.627.530,00	50	81.255.060,00	67	121.882.590,00	100	182.610.120,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios dan Bedak	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.238.193.480,00	25	309.548.370,00	50	619.096.740,00	75	928.645.110,00	100	1.238.193.480,00
2.09.01.01.00.4.1.2.01.23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Dinas Perhubungan	347.410.000,00	22	77.727.000,00	50	154.554.000,00	67	231.831.000,00	100	347.410.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.03.01.00.4.1.2.01.34	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.503.500,00	50	2.251.750,00	75	3.377.625,00	100	4.503.500,00	100	4.503.500,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		2.185.600.800,00		555.905.775,00		1.101.996.100,00		1.638.098.925,00		2.185.600.800,00
2.05.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan (TamanKota)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	5.200.000,00	0	0	0	0	50	2.600.000,00	100	5.200.000,00
1.04.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan (Rusunawa)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	661.003.200,00	25	165.250.800,00	50	330.501.600,00	75	495.752.400,00	100	661.003,200,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan (Senkuko)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.640.000,00	0	0	100	10.640.000,00	100	10.640.000,00	100	10.640.000
2.13.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	62.312.500,00	58	38.167.500,00	66	44.487.500,00	86	58.352.500,00	100	72.268.500,00
1.20.03.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	57.900.000,00	17	9.900.000,00	53	30.400.000,00	91	52.900.000,00	100	57.900.000,00
4.04.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.112.033.500,00	25	278.008.375,00	50	556.016.750,00	75	834.025.125,00	100	1.112.033.500,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Perhubungan	21.600.000,00	25	5.400.000,00	50	10.800.000,00	75	16.200.000,00	100	21.600.000,00
1.03.01.01.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.530.000,00	25	6.132.500,00	50	12.265.000,00	75	18.397.500,00	100	24.530.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.03.01.00.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	2.500.000,00	0	0	20	500.000,00	20	500.000,00	100	2.500.000,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.13	Retribusi Terminal-Tempat Parkir Untuk kendaraan Penumpang & Bis Umum	Dinas Perhubungan	2.670.000,00	25	666.000,00	50	1.332.000,00	75	1.998.000,00	100	2.670.000,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.15	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya Dilingkungan Terminal	Dinas Perhubungan	24.217.600,00	25	6.054.000,00	50	12.108.800,00	75	18.162.000,00	100	24.217.600,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	51.205.000,00	25	12.018.000,00	50	24.036.000,00	75	36.054.000,00	100	51.205.000,00
2.13.01.01.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir GOR & Stadion	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.956.000,00	26	1.825.200,00	46	3.229.200,00	80	7.990.000,00	100	9.956.000,00
3.06.01.01.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.600.000,00	24	20.700.000,00	49	41.400.000,00	73	62.100.000,00	100	84.600.000,00
3.03.01.01.00.4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	55,233,000.00	25	13,808,250.00	50	27,616,500.00	75	41,424,750.00	100	55,233,000.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		577.140.500,00		156.160.125,00		316.695.250,00		468.480.375,00		577.140.500,00
2.12.01.01.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	560.290.500,00	25	140.072.625,00	50	280.145.250,00	75	420.217.875,00	100	560.290.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.01.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.100.000,00	50	4.050.000,00	100	8.100.000,00	100	8.100.000,00	100	8.100.000,00
2.12.01.01.00.4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.750.000,00	0	0	50	4.375.000,00	50	4.375.000,00	100	8.750.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO